



## MATERI 2

# TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Pelatihan

## Tujuan Umum

Peserta dapat memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika PBJP

## Tujuan Khusus

**Setelah materi ini disampaikan, peserta diharapkan mampu memahami:**

- Tujuan PBJP
- Kebijakan PBJP
  - Memahami usaha kecil dan peranannya
  - Memahami penggunaan produk dalam negeri
  - Memahami pengadaan berkelanjutan
- Prinsip PBJP
- Etika pengadaan pada PBJP

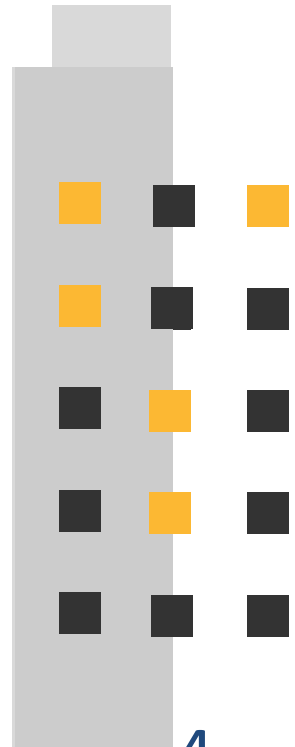
# ☐ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

☐ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

☐ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

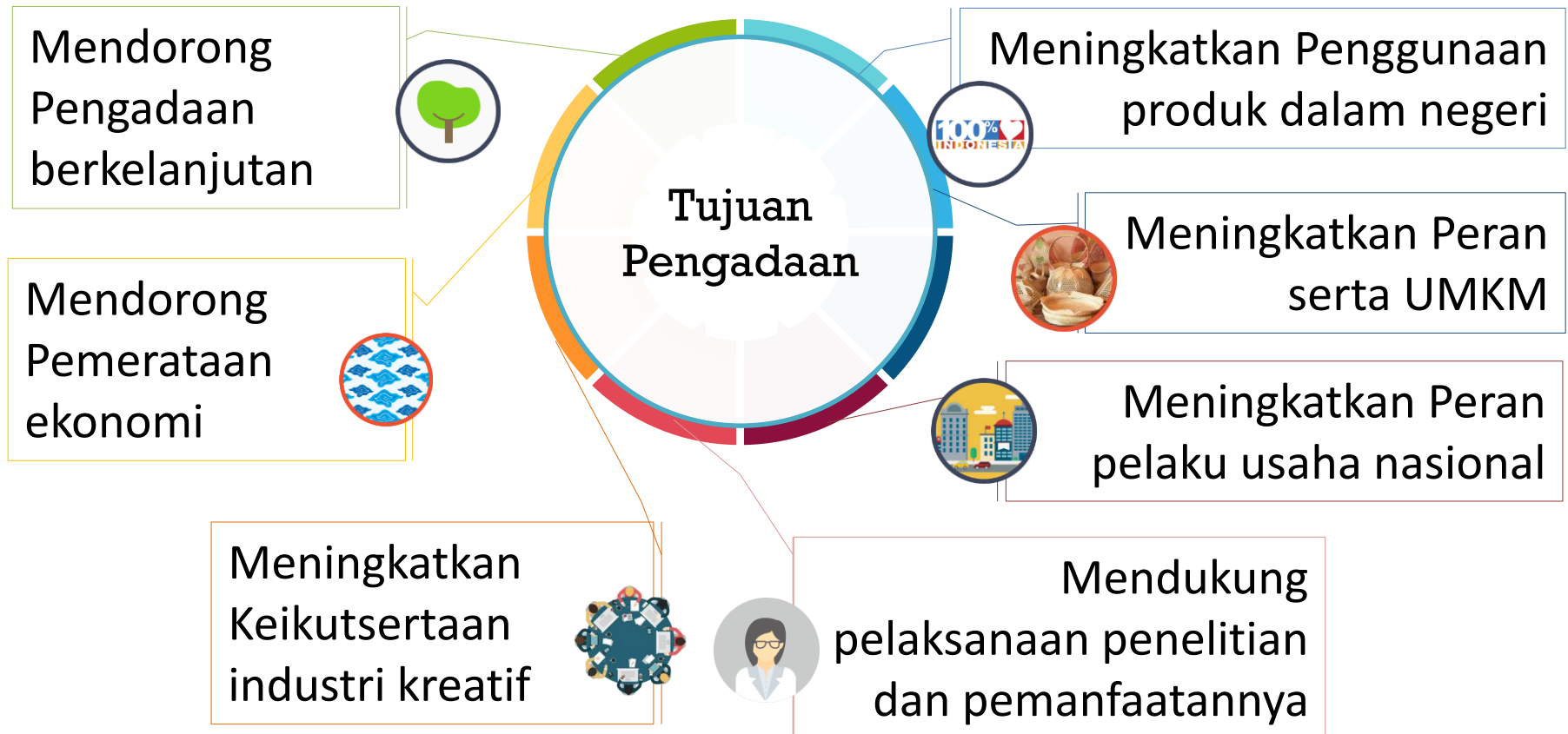
☐ Etika Pengadaan Barang/Jasa

# Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?



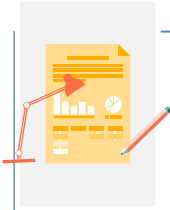


Menghasilkan B/J yang tepat\*  
untuk setiap uang yang dibelanjakan  
\*kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

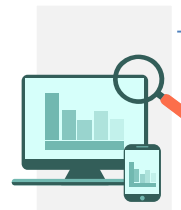


- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**
- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- Etika Pengadaan Barang/Jasa

# Kebijakan PBJ



1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ



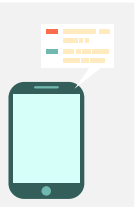
2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif



3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ



4) Mengembangkan *E-marketplace* PBJ



5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik



6) Mendorong penggunaan b/j dalam negeri & SNI



7) Memberikan kesempatan UMKM



8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif



9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

# Apa hubungan antara tujuan dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?





# Hubungan Tujuan dan Kebijakan PBJ

Tujuan PBJ	Kebijakan PBJ
Menghasilkan B/J yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ</li> <li>• Melaksanakan PBJ yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif</li> <li>• Memperkuat kapasitas kelembagaan &amp; SDM PBJ</li> <li>• Mengembangkan E-marketplace</li> <li>• Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik</li> </ul>
Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri & SNI
Mendorong Pemerataan ekonomi	Memberikan kesempatan UMKM
Meningkatkan Peran serta UMKM	
Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional	
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya	Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif
Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif	
Mendorong Pengadaan berkelanjutan	Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

# 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ



- Kualitas identifikasi kebutuhan
- Kualitas penetapan barang/jasa
- Kualitas penentuan cara pengadaan barang/jasa
- Kualitas penjadwalan
- Kualitas penganggaran

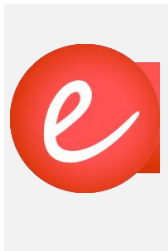
## 2) Melaksanakan PBJ Yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif antara lain :



SPSE



SiRUP

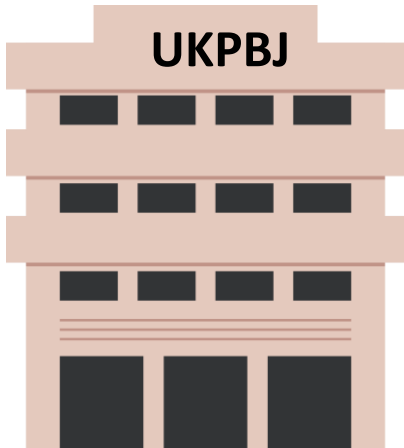


E-katalog



SiKaP

### 3) Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan SDM PBJ



- Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural
- SDM yang profesional dengan adanya Pengelola PBJ
- SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang PBJ

## 4) Mengembangkan *E-marketplace* PBJ



**Katalog Elektronik**  
(Nasional, Sektoral & Lokal)



**Toko Daring**  
(*Online Shop*)



**Pemilihan Penyedia**  
(*e-tender/e-selection*)

## 5) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik



- K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi LPSE
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi PBJ
- Mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan *e-marketplace*

## 6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI



dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib:

- Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri
- Mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP
- Memberikan preferensi harga

## 6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib :

---

Menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

---

Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %



LKPP dan/atau K/L/Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik



## 6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

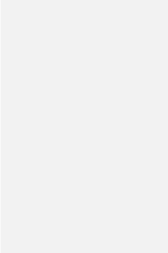
Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal:

1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri
2. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan

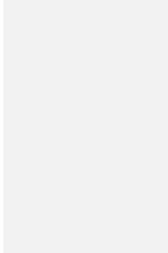


## 6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

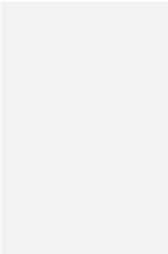
### Preferensi Harga



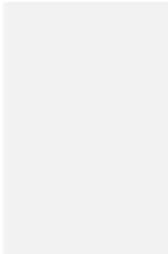
insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima



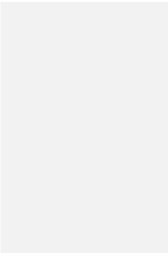
PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M



Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%



Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%



Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

## 6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

### Rumus Perhitungan HEA

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

**KP** = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi

**HP** = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

*HEA adalah Hasil Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi*



Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang

- Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan peringkat pemenang Tender/Seleksi

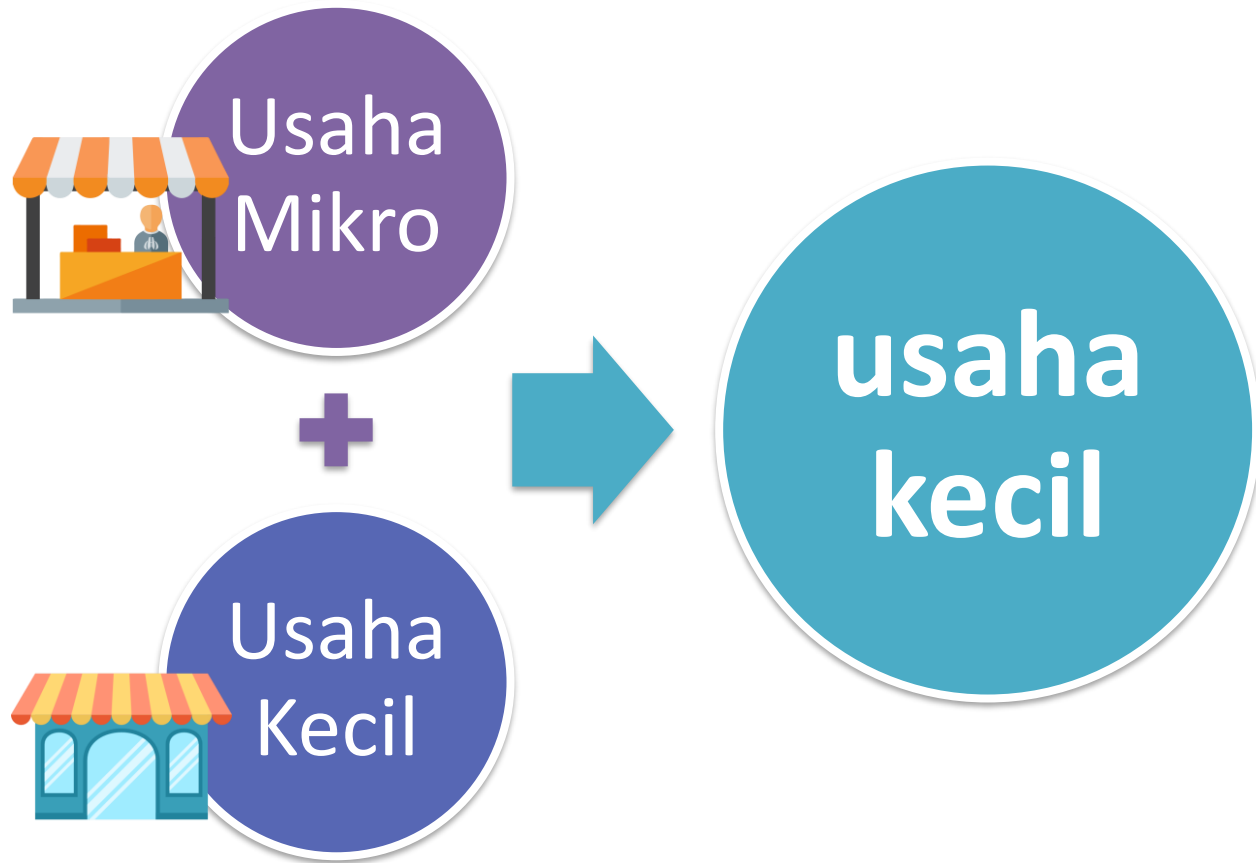
## 7) Kesempatan kepada UMKM <sup>(1/4)</sup>

- menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil
- Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, ***kecuali*** untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
- Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektronik
- Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil



## 7) Kesempatan kepada UMKM (2/4)

### Peran Serta Usaha Kecil



## 7) Kesempatan kepada UMKM (3/4)

### Pengertian Usaha Mikro



- usaha produktif
- orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
- memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## 7) Kesempatan kepada UMKM (4/4)

### Pengertian Usaha Kecil



- Usaha ekonomi produktif
- Berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha
- bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
- Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## 8) Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif



### Penelitian

- PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti
- Pelaksana diperluas
- Penelitian berbasis output
- Dapat lebih dari 1 tahun



### Industri Kreatif

- Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif
- Mendorong inovasi
- Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif
- Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI



## 9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan



PBJ yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

## 9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup



### Aspek Ekonomi

- biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut



### Aspek Sosial

- pemberdayaan usaha kecil
- jaminan kondisi kerja yang adil
- pemberdayaan komunitas/usaha lokal
- kesetaraan, dan
- keberagaman

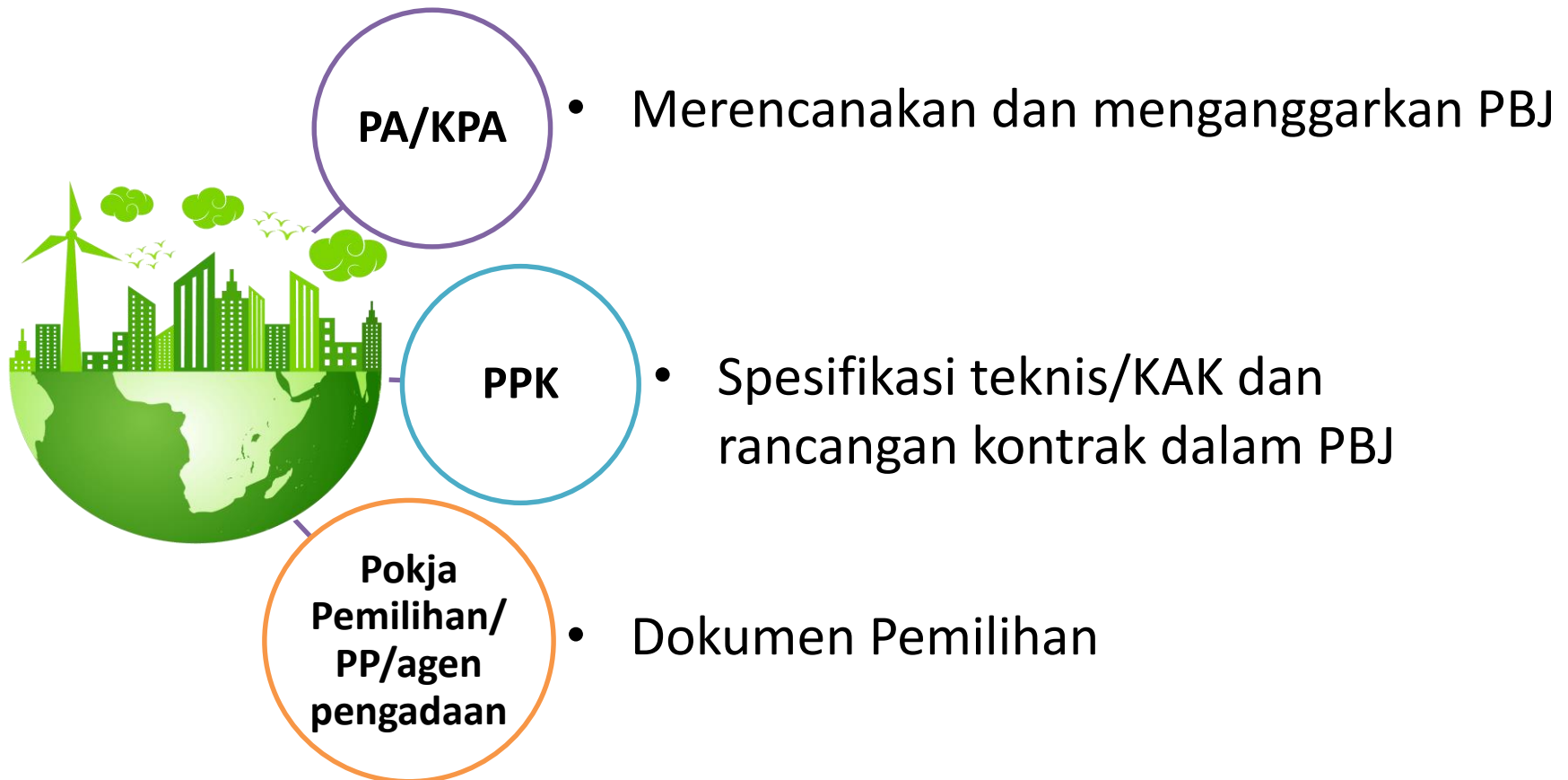


### Aspek Lingkungan Hidup

- pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan
- kualitas udara
- kualitas tanah
- kualitas air
- menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan

## 9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

### Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan



- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- **Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**
- Etika Pengadaan Barang/Jasa

# Prinsip Pengadaan



Efisien



Efektif



Transparan



Terbuka



Bersaing



Adil



Akuntabel

- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- **Etika Pengadaan Barang/Jasa**



# Pertentangan Kepentingan (1)



Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama



Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;



Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;

*Lanjutan....>>*



# Pertentangan Kepentingan (2)



Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PP pada pelaksanaan PBJ di K/L/Perangkat Daerah



PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;



Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.



# Terima kasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa

V. 2019



**PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR**  
**TES MATERI 02 – TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PBJP**

**Nama** : \_\_\_\_\_  
**Instansi** : \_\_\_\_\_

- Pada tes materi terdapat 2 jenis soal yaitu: Benar/Salah dan Pilihan Ganda.
- Soal Benar/Salah berjumlah 5 soal. Tulislah huruf B, jika menurut anda kalimat pernyataan benar, dan tulislah huruf S jika kalimat pernyataan salah.
- Soal Pilihan Ganda berjumlah 10 soal. Berilah tanda X pada pilihan A, B, C atau D pada jawaban yang menurut anda paling tepat.
- Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 10 menit.

---

**BENAR/SALAH**

No	Penyataan	Jawaban
1	Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang salah satunya diukur dari aspek biaya/harga yang paling murah	
2	Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa ialah mendorong perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan perpajakan	
3	Salah satu prinsip pengadaan barang/jasa ialah transparan, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas	
4	Pejabat Pengadaan diperbolehkan menerima rabat dari Penyedia karena tidak termasuk dalam komponen HPS dan bukan merupakan pelanggaran etika pengadaan	
5	Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama	

## PILIHAN GANDA

6. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....
  - A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
  - B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
  - C. Meningkatkan penggunaan dalam negeri
  - D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab
7. Yang **BUKAN** merupakan etika pengadaan barang/jasa ialah ....
  - A. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
  - B. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 ttg administrasi pemerintahan
  - C. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
  - D. menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
8. Persyaratan dalam dokumen pengadaan yang tidak mengarah pada satu spesifikasi atau penyedia tertentu ialah contoh penerapan prinsip pengadaan barang/jasa ....
  - A. Adil
  - B. Bersaing
  - C. Tidak diskriminatif
  - D. Terbuka
9. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa ialah....
  - A. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana
  - B. Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
  - C. Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi
  - D. Pokja pemilihan bekerja secara professional dan tidak merangkap sebagai penyedia
10. Salah satu contoh kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah ....
  - A. Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil
  - B. Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektronik
  - C. Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %
  - D. Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang/jasa produksi dalam negeri

**LATIHAN SOAL MATERI 2**

**TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PBJP**

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Instansi** : \_\_\_\_\_

1. *Jodohkanlah isian-isian pada pernyataan berikut dengan memilih pilihan yang tepat!*

Pernyataan	Pilihan
Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, ..... , waktu, ....., lokasi, dan .....	A. Peralatan B. Jumlah C. Tenaga Kerja D. Biaya E. Koordinasi F. Administrasi G. Penyedia

2. *Lengkapilah isian-isian pada kalimat berikut!*

- Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah meningkatkan keikutsertaan industri ....., mendorong pemerataan ..... dan mendorong Pengadaan .....
- Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan produk .....
- Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah meningkatkan peran serta usaha mikro, ..... dan usaha menengah
- Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah mendukung pelaksanaan dan pemanfaatan hasil .....

**LATIHAN SOAL MATERI 2**

**TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PBJP**

3. *Isilah Isian-Isian Pada Pernyataan Tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Berikut Ini!*

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban
1	Meningkatkan ..... Pengadaan Barang/Jasa	a. Kualitas Perencanaan b. Kualitas Kinerja c. Efektifitas Dan Efisiensi
2	Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, ..... dan .....	a. Terbuka, Dan Kompetitif b. Terbuka, Dan Bersaing c. Adil, Dan Akuntabel
3	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan ..... Pengadaan Barang/Jasa	a. Sumber Daya Manusia b. Honorarium Pengelola c. Profesionalisme Pengelola
4	Mengembangkan ..... Pengadaan Barang/Jasa	a. E-Marketplace b. E-Procurement c. E-Katalog
5	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta .....	a. Transaksi Elektronik b. Infrastruktur Internet c. Online Marketing

4. *Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan pilihan jawaban yang tepat!*

Pernyataan	Pilihan
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 1. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan ..... 2. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, ....., dan Usaha Menengah. 3. mendorong pelaksanaan penelitian dan ... 4. melaksanakan Pengadaan .....	A. Berkelanjutan B. Standar Internasional (SI) C. Usaha Besar D. Industri Lokal E. Usaha Kecil F. industri kreatif G. Usaha Lokal H. Standar Nasional Indonesia (SNI)

**LATIHAN SOAL MATERI 2**

**TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PBJP**

5. Lengkapilah tabel prinsip pengadaan yang paling tepat untuk pernyataan dibawah ini!

No	Pernyataan	Prinsip Pengadaan
1	Pokja Pemilihan menggunakan aplikasi SPSE dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa	
2	PPK bersama Pokja Pemilihan melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis barang yang akan diadakan dalam pengadaan mobil baru untuk operasional kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan existing	
3	Pokja Pemilihan memberikan informasi terkait perubahan dokumen pemilihan kepada seluruh peserta pemilihan	
4	Pokja Pemilihan melakukan negosiasi dalam proses <i>e-purchasing</i> terhadap Penyedia dalam pengadaan komputer dan laptop karena kebutuhannya melebihi <i>economic order quantity</i>	
5	Pokja Pemilihan dalam membuat persyaratan kualifikasi tidak membatasi domisili penyedia hanya di provinsi tempat berlangsungnya pengadaan, tetapi membuka kesempatan untuk semua penyedia di Indonesia yang memenuhi persyaratan	
6	Pokja Pemilihan mendokumentasikan seluruh tahapan pengadaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

6. Pilihlah pernyataan yang tidak melanggar atau sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa dengan memberi tanda ceklist ✓ pada kolom jawaban!

No	Penyataan	Jawaban
1	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang	



**LATIHAN SOAL MATERI 2****TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PBJP**

	berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa	
2	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;	
3	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara	
4	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP dapat menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa	
5	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi	
6	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa	
7	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait	
8	Semua pihak yang terlibat dalam PBJP dapat saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat	



**LATIHAN SOAL MATERI 2**

**TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PBJP**

7. Pilihlah pernyataan yang termasuk pertentangan kepentingan dengan memberi tanda ceklist ✓ pada kolom jawaban! (petunjuk)

No	Penyataan	Jawaban
1	Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama	
2	Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah	
3	Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi	
4	Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama	
5	PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia	
6	Anak dari Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan penyedia di Daerah tersebut	
7	Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana	
8	Konsultan Perencana berperan sebagai konsultan pengawas dari pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya	